

Birokrasi dalam Kebudayaan Administrasi: Suatu Masalah dalam Pengembangan Otonomi Daerah

Nico. S. Kalangie
(Universitas Indonesia)

perpanduan yang kokoh antara birokrasi dengan feodalisme pribumi dalam sistem pemerintahan. Sehubungan dengan ini, berbagai kepentingan ekonomi,

kepangkatan, dan keuntungan-keuntungan hubungan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, akibat pemberian fasilitas proyek dan lain-lain sejenisnya, telah sangat menghidupkan keseluruhan kelompok dengan berkembangnya pola hubungan hierarchi feodalistis dengan segala konsekuensinya. Kondisi ini berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru yang menghasilkan KKN secara menyeluruh, termasuk pada organisasi-organisasi swasta.

Kondisi anomalia tersebut tidak akan mungkin dihapuskan kalau tidak direncanakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Padahal, dalam menghadapi otonomi daerah upaya ini belum terlihat dirancang oleh pemerintah; bahkan rupanya dipikirkan pula belum. Ada pula kemungkinan lain bahwa justru yang dipikirkan adalah bagaimana mempertahankan kehidupan birokrasi. Dengan demikian, masalah birokrasi akan tidak terlepas pula dari administrasi atau pemerintahan otonomi daerah, selain masalah lainnya.

Abstrak

Birokrasi sebagai suatu bentuk administrasi dalam organisasi formal (di sini dibatasi pada organisasi pemerintahan di Indonesia) merupakan suatu masalah yang banyak dibicarakan oleh ilmuwan-

ilmuwan sosiologi, ekonomi, dan administrasi umumnya. Yang menjadi perhatian utama mereka adalah analisis evaluatif tentang efisiensi kerjanya, sejak Max Weber melontarkannya sebagai bentuk administratif

terbaik yang rasional dan efisien dalam menghasilkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dasawarsa 90an mengisyaratkan bahwa capaian-capaian birokrasi makin jauh menyimpang dari apa yang menjadi tujuan penciptanya. Tentunya saja sebagai suatu bentuk pranata telah terjadi pula modifikasi pengertian atau definisinya, bahkan juga dalam hal prinsipnya.

Makalah ini membicarakan apa sebab birokrasi di Indonesia sangat mantap, seolah-olah tidak merasakan adanya ketidakefektifan dan ketidak-efisienan dalam organisasi pemerintah. Demikian pula, prinsip rasionalitas tidak lagi terlihat berfungsi seperti yang dimaksudkan oleh Weber. Kompleksitas permasalahan ini telah bertambah dengan